

# GOYANGAN TELUNJUK FORT ROTTERDAM KEPADA ISTANA WOLIO Transliterasi dan Sigian Tekstual-Historis terhadap Naskah *EAP212/6/3* (Abdul Mulku Zahari *SR/45/AMZ*)

Dr. Suryadi  
Universiteit Leiden

\* Korespondensi: [soulsuffering@yahoo.co.id](mailto:soulsuffering@yahoo.co.id)

---

## ABSTRACT

*This article aims to discuss important items contained in the Abdul Mulku Zahari Buton Collection manuscript with collection number EAP212/6/3. This manuscript generally contains the Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) letters to Sultan Buton Azimudin. In this study, the manuscript is presented in a codicological and historical context. The results of this study provide some reflection on the situation of the Kingdom of Buton at the end of the 18th century. By comparing the articles of several contracts between Buton and the VOC, it can be suggested that the Dutch continued to narrow the space of the Buton sultans. Additional or amended laws are more likely to benefit the Dutch than Buton. To some extent the contractual agreements between Buton and the VOC influenced the pattern of political relations among the Buton nobles. Although there are no clear boundaries, it can be said that the Kaomu and Walaka groups tend to be divided in dealing with contractual agreements made with the VOC.*

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan membahas butir-butir penting yang terkandung naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari dengan kode koleksi *EAP212/6/3*. Naskah ini secara umum berisi surat-surat *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) Kepada Sultan Buton Azimudin. Dalam penelitian ini, naskah disajikan dalam konteks kodikologis dan historis. Hasil penelitian ini memberikan beberapa refleksi tentang situasi Kerajaan Buton pada akhir abad ke-18. Dengan membandingkan pasal-pasal beberapa kontrak antara Buton dengan VOC, dapat dikesan bahwa Belanda terus berusaha mempersempit ruang gerak sultan-sultan Buton. Pasal-pasal tambahan atau yang diubah lebih cenderung menguntungkan Belanda ketimbang Buton. Sampai batas tertentu kontrak-kontrak perjanjian antara Buton dengan VOC mempengaruhi pola hubungan politik di kalangan kaum bangsawan Buton. Walau tidak bisa dibuat garis batas yang tegas, dapat dikatakan bahwa kalangan *kaomu* dan *walaka* cenderung terbelah dalam menyikapi kontrak-kontrak perjanjian yang dibuat dengan VOC.

**Keyword:** *Manuscript; Textual-Historical; Buton; Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), Codicology*

## 1. PENDAHULUAN

Esai ini membahas salah satu naskah Buton dari koleksi Abdul Mulku Zahari di Baubau, Buton. Naskah tersebut adalah sebuah surat dari *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC/Kompeni) kepada Sultan Buton Azimuddin yang dalam katalogisasi yang dibuat oleh Ikram dkk. (2001:238) diberi kode *SR/45/AMZ*. Melalui Proyek “*EAP212: Locating, documenting and digitising: Preserving the endangered manuscripts of the Legacy of the Sultanate of Buton, South-Eastern Sulawesi Province, Indonesia*” (2009-2010), surat ini sudah didigitalkan.<sup>1</sup> *EAP212/6/3 // SR/45/AMZ* (selanjutnya akan ditulis *EAP212/6/3* saja) hanyalah salah satu dari banyak surat korespondensi antara Keraton Buton/Istana Wolio dan VOC yang tersimpan di Buton dan juga di luar negeri seperti di Leiden dan St. Petersburg (Suryadi 2007a,b; Suryadi, 2010; Katkova, 2011). Menurut Ikram dkk. (2001:10-11) korpus ini mencakup surat pribadi maupun formal, seperti surat-menyurat kenegaraan dan surat antarpejabat mengenai soal pemerintahan, [s]urat dari VOC kepada Sultan [bagian yang paling menarik dari korpus ini], [s]urat-surat pengangkatan, surat rekomendasi, [dan] surat ketetapan.

---

1 Lihat: <https://eap.bl.uk/archive-file/EAP212-6-3> (diakses 20 Februari 2019).

*EAP212/6/3* berisi berbagai tanggapan, kritik, dan peringatan VOC kepada Istana Wolio. Esai ini mencoba memahami isi surat tersebut (mengidentifikasi butir-butir penting yang terkandung di dalamnya) yang sampai batas tertentu merefleksikan dinamika hubungan Buton – Belanda di akhir abad ke-18. Dalam rangka itu, saya juga akan menjelaskan konteks historis surat ini. Hafisah dan Kramadibrata (2018) sudah membahas naskah ini tapi tidak menyediakan transliterasi lengkapnya.

*EAP212/6/3* cukup unik karena inilah satu dari sedikit surat-surat yang ditulis VOC kepada raja-raja lokal Nusantara, dalam hal ini Sultan Buton, yang sekarang masih tersisa dan berada di tangan kolektor lokal. Selama ini, yang sering dibahas oleh peneliti di bidang ini, juga dalam konteks pernaskahan Buton, adalah surat-surat dari pihak sebaliknya: surat raja-raja lokal Nusantara yang dikirim kepada VOC/Kompeni. Dengan demikian, dapat diduga bahwa kandungan *EAP212/6/3* merepresentasikan pandangan Kompeni kepada Buton, berbeda dengan banyak surat sebelumnya yang sudah dikaji, yang menggambarkan pandangan Buton kepada Kompeni.<sup>2</sup>

Surat-surat seperti ini (dari kedua belah pihak), yang umumnya ditulis dalam aksara Arab-Melayu (Jawi) mengandung informasi sejarah yang tak kurang nilainya dibanding dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang Eropa. Namun sayangnya, masih belum banyak sejarawan yang memanfaatkannya untuk kajian sejarah kolonial di Indonesia. Mereka lebih cenderung memakai ‘terjemahan’ atau ekstrak surat-surat itu yang tersedia dalam Bahasa Belanda dan tersimpan dalam arsip-arsip VOC di Belanda atau di negara-negara yang dulu dijajah Belanda, yang mungkin saja sudah tereduksi aspek humanisnya.<sup>3</sup> Contoh yang terbaru adalah karya Hendrik E. Niemeijer dkk., *The Diplomatic Correspondence between Asian Rulers and Batavia Castle during the 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> centuries: The Digital Reconstruction of a Lost Treasure* (Jakarta: ANRI/TCF, 2015).

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *EAP212/6/3*: Informasi kodikologis

*EAP212/6/3* adalah sebuah surat panjang yang mencapai 15 halaman. Ab. Razak dkk. (2011:29) menyebut surat ini sebagai “surat sosial yang terpanjang yang pernah” mereka temui sebagai pengkaji naskah. Akan tetapi dua halaman terakhir sebenarnya adalah dua surat yang berbeda (Ab. Razak dkk. mengira bagian itu sebagai “nota kaki”; bandingkan dengan Ikram dkk., 2001:238 yang tepat mengidentifikasinya), dengan gaya tulisan yang berbeda pula (Gambar 5 dan Gambar 6). *EAP212/6/3* dikirimkan oleh otoritas VOC di Makassar, yang tentunya mewakili Gubernur Jendral VOC di Batavia yang waktu itu dijabat oleh Willem Arnold Alting (Stapel, 1941:68-69) kepada Sultan Buton Azimuddin. Ini dapat diidentifikasi dari tulisan tangan di sudut atas halaman pertama surat ini (Gambar 2a), di bawah cap mohor yang berwarna merah (tidak berinskripsi) yang bertuliskan: “*Maccasjer in het Kasteel Rotterdam den 25<sup>e</sup> february 1791<sup>4</sup>*” dengan tanda tangan otoritas tertinggi VOC di Makassar di bawahnya (Gambar 2a). Tanda tangan itu sulit dibaca, tapi kita boleh berasumsi bahwa itu adalah tanda tangan Willem Beth yang menjadi Gubernur VOC di Makassar pada waktu itu.

---

2 Untuk kajian di bidang ini yang menyangkut Buton, lihat misalnya Shellabear (1898), Suryadi (2007a,b), Suryadi (2010), Suryadi (2015). Lihat juga Zahari (t.t).

3 Banyak sejarawan Barat, dan tak kurang pula sejarawan Indonesia, yang mengkaji sejarah kolonialisme di Indonesia, tidak bisa membaca huruf Jawi, sebuah kelemahan dalam kurikulum ilmu sejarah yang sampai sekarang belum juga disadari. Namun tampaknya ini berkelindan dengan pandangan Eurosentrisme akut dalam ilmu sejarah: bahwa dokumen-dokumen pribumi dianggap kurang nilai historisnya dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang ditulis oleh kolonialis Barat. Akibatnya, walaupun surat-surat beraksara Jawi itu sudah banyak yang dialihaksarakan oleh filolog dan peneliti sastra Nusantara klasik, tetap saja belum banyak sejarawan yang memanfaatkannya. Dalam konteks Buton, karya Susanto Zuhdi (2010) adalah sebuah pengecualian. Ia telah menggunakan sumber-sumber primer pribumi yang amat kaya, termasuk surat-surat kerajaan Buton, untuk merekonstruksi sejarah masa lampau Buton.

4 Maksudnya: ditulis di Benteng Fort Rotterdam, Makassar, pada 25 Februari 1791. Benteng ini diperkuat oleh VOC menyusul kemenangannya atas Gowa yang dibantu oleh orang-orang Bugis dari Kerajaan Bone (lihat Sutherland, 2011).

Menurut deskripsi British Library, *scope* dan *content* naskah ini adalah sebagai berikut:

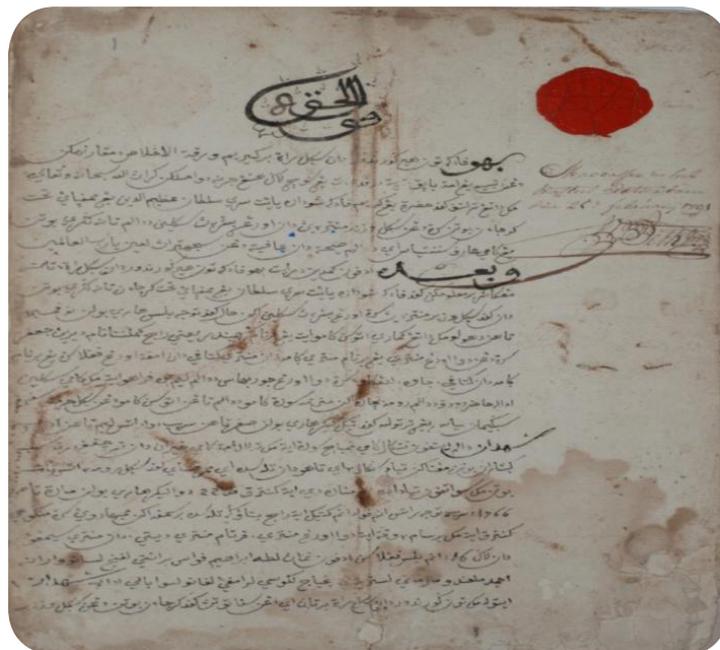
European paper: Crowned Shield (Strasbourg lily) (7.0), with J. Honig & Zoonen, 42 x 32 cm; 15 pages; comprised roughly of 20-24 lines per page; black ink; Arabic-Malay script; Malay language; no colophon (*sic*). Article is fragile, riddled with holes, unbound with pages tattered, although writing within is still legible. Content deals with various issues addressed to Sri Sultan Azimuddin of Buton from the Company.

Halaman kedua surat ini kertasnya berwarna hijau kelabu, agak berbeda dengan kertas pada halaman-halaman yang lain. Nomor halaman muncul kemudian karena ditambahkan oleh penyimpanan atau pembaca. Gambar 1 menunjukkan penjelasan kodikologis umum mengenai EAP212/6/3 dalam *Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari* karya Achadiati Ikram, Tjiptaningrum Fuad Hassan, dan Dewaki Kramadibrata (Ikram. dkk., 2001:238).

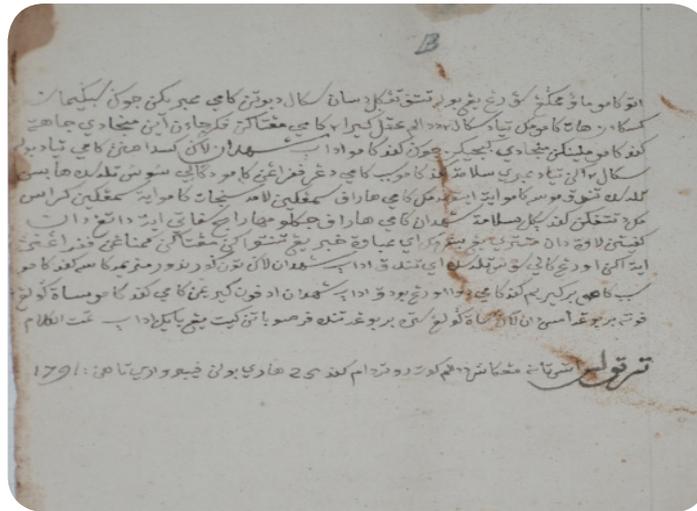
SR/45/AMZ	SURAT	KOMPENI	KEPADA	SULTAN
23/Jawi/18/4	Bhs. Melayu	Aks. Arab	Prosa	Rol 1.23
16 hlm.	2-24 baris/hlm.	42 x 32 cm	Kertas Eropa	
12 hlm.	20 baris/hlm.	32 x 21 cm	Kertas Eropa	

Naskah ini terdiri atas dua teks. Dalam Daftar Mikrofilm Arsip Nasional judul yang diberikan adalah: *Gumadur tidak setuju dengan usul Sultan Buton untuk mengubah kontrak perjanjian th. 1766*. Teks pertama halamannya diberi nomor dengan angka Arab sampai 13. Halaman pertama bercap di sudut kanan atas dan dibubuhi tanda tangan, di tengah atas ada kaligrafi *Qauluhu al-Haq*. Tulisan tangannya halus dan konsisten sampai halaman 13; tulisan kata *syahdan* yang tampak mencolok.

**Gambar 1:** Kode dan informasi kodikologis EAP212/6/3 (Abdul Mulku Zahari SR/45/AMZ) menurut Achadiati Ikram dkk. (2001:238)



**Gambar 2a:** EAP212/6/3 (Abdul Mulku Zahari SR/45/AMZ), halaman 1



Gambar 2b: EAP212/6/3 (Abdul Mulku Zahari SR/45/AMZ), halaman 13.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, EAP212/6/3 terdiri dari tiga surat: halaman 1-13 adalah surat VOC/Kompeni kepada Sultan Azimuddin dan halaman 14 dan 15 adalah dua surat Sultan Buton Dayan Asraruddin (1799-1822) kepada Kompeni, yang tidak lengkap. Jadi, dari segi isi, dua halaman terakhir sama sekali tidak ada hubungannya dengan tiga belas halaman pertama.

Sangat mungkin EAP212/6/3 aslinya ditulis dalam Bahasa Belanda, kemudian baru diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu beraksara Jawi.<sup>5</sup> Mungkin saja penulisan/penerjemahan surat ini dalam aksara Jawi menggunakan jasa seorang penerjemah pribumi Melayu.<sup>6</sup> Kesan penerjemahan dari bahasa Belanda itu cukup terasa setelah kita membaca transliterasi surat ini (lihat lampiran) yang bahasanya agak berbelit-belit, yang mungkin karena mengikuti gaya kalimat versi Belandanya: kalimat-kalimatnya cukup panjang dengan banyak repetisi, berbeda dengan surat-surat yang dikirim oleh raja-raja Buton kepada Kompeni yang kalimat-kalimatnya umumnya lebih pendek dan kurang mengandung repetisi. Di Zaman VOC, peran penerjemah (*translator*) dan jurubahasa (*interpreter*) yang biasanya dipegang oleh orang Eropa sendiri, *meztizo* dan pribumi yang dipercaya, memiliki peranan penting karena merupakan salah satu faktor penentu suksesnya baik kontrak dagang maupun politik antara Kompeni dengan kaum pribumi.<sup>7</sup>

Tentang karakteristik bahasa EAP212/6/3, Hafisah dan Kramadibrata (2018:399) menuliskan sebagai berikut:

The language used in "The Dutch-East India Company's letter to Sultan Azimuddin" had common characteristic to classical Malay, such as the appearance of the sound [h] which is symbolized by the letter ه at the end or middle of a number of words. In addition, there were also writing characteristics that were commonly found in manuscripts from the eastern archipelago because the writing of the letters got the influence from local narratives, namely the appearance of the sound [ŋ] behind the sound [k] in the words "semangkin" and "Mangkasyar".

5 Kita dapat membandingkannya dengan model surat-surat kontrak antara VOC dan raja-raja lokal dalam periode ini, termasuk dengan Buton/Butun. Demikianlah umpamanya, dalam naskah Kontrak Sultan Butun dengan VOC, 27 Desember 1794 disebutkan: “[A]dapun kontrak perdamaian itu adalah suatu serupahnya di dalam tangan kerajaan Butun itu, inilah kami suruhkan bacakan kamu akan bernyata-nyata kamu daripada perkataan bahasa Wilandanya dan bahasa Melayunya diartikan baik-baik maknanya sekalian kepada utusan itulah.” (Zuhdi, 2010:331; kursif/garis bawah oleh Suryadi).

6 Komunitas Melayu yang berasal dari bagian barat Kepulauan Nusantara sudah lama bertapak di Makassar. Ini mengingatkan kita pada salah seorang tokohnya yang terpenting, Datuk Maharaja Lela, yang mendapat tempat istimewa di kalangan penguasa Gowa di tahun 1660-an (Sutherland, 2001:400).

7 Salah satu penerjemah pribumi VOC yang menonjol di Makassar adalah Bumi Perisi Ince Jenal yang bekerja sebagai *tolk* Kompeni dari 1704-1730an (Sutherland, 2010:332). Sutherland (2010) juga menyebut sejumlah *translators* dan *interpreters* lainnya yang bekerja untuk Kompeni di Makassar, seperti Jan Japon, Willem Everts Stosious, klan *mestizos* (yang sangat menonjol) seperti Burgmans, Volls, dan Mersmans, dan penerjemah Bugis La Passeere.

Meskipun dalam tradisi literasi Buton orang terbiasa menulis dalam bahasa Wolio memakai aksara Jawi (lihat catatan Van den Berg dalam Cense, 1954:156), namun dalam surat-surat korespondensi antara Keraton Buton/Istana Wolio dan Belanda atau sebaliknya, juga antara sesama penguasa kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara, bahasa Melayulah yang cenderung dipakai karena fungsinya sebagai *lingua franca* di wilayah ini.

### **Konteks historis EAP212/6/3 (SR/45/AMZ)**

Sebelum mengidentifikasi lebih lanjut kandungan EAP212/6/3, perlu dijelaskan secara sepintas hubungan Buton dengan Belanda yang melatari konteks sejarah surat ini. Hubungan resmi antara komunitas pedagang bertubuh tinggi, berjenggot lebat, dan berhidung merah-mancung di bawah bendera VOC itu dengan Kerajaan Buton sudah dimulai ketika Buton diperintah oleh Sultan Dayanu Ikhsanuddin atau La Elangi (1578-1615).<sup>8</sup> Namun, lama sebelum VOC hadir di Kepulauan Nusantara bagian timur, Buton sudah berstatus sebagai sebuah kerajaan maritim, tapi hampir selalu berada dalam dilema dan pusaran konflik karena berada di tengah rivalitas antara dua kerajaan tentangnya yang kuat: Gowa (atau Gowa-Talloq) dan Ternate.

Secara geografis Buton terletak di jalur pelayaran strategis antara Jawa dengan Sulawesi dan Maluku Utara, yang merupakan salah satu “traditional route” VOC “to Spice Islands”, meminjam kata-kata Robert Parthesius (2010:143). Sejak semula VOC juga sudah menggunakan jalur laut yang penting ini, walau kadang-kadang sangat berbahaya karena ancaman angin musim<sup>9</sup> yang mengganggu pelayaran kapal-kapalnya dari Jawa (Batavia) ke Ternate atau sebaliknya. Sebelum VOC berhasil menancapkan pengaruhnya di perairan Nusantara bagian timur melalui *Perjanjian Bungaya* (18 November 1667)<sup>10</sup>, Buton sudah berada dalam pengaruh Kerajaan Ternate (Zuhdi, Ohorella, dan Said D., 1996:65). Sudah sejak 1580, Ketika Sultan Ternate Babullah sedang jaya, Buton berada dalam pengaruh Ternate, tetapi terus diganggu oleh Gowa (Blok, 1817, I:96). Kerajaan Gowa, lebih-lebih semasa dipimpin Sultan Hasanuddin (1653-1669), “ayam jantan” dari Timur itu, terus berusaha meluaskan pengaruhnya, tidak terkecuali ke pulau-pulau yang diklaim oleh Buton sebagai wilayahnya, seperti Kabaena dan lain-lain. Kehadiran VOC di wilayah ini telah mempertajam rivalitas kedua kerajaan itu.<sup>11</sup> Posisi Buton dapat diibaratkan seperti pelanduk yang terjepit dalam pertarungan dua “gajah”, yang kemudian dicampurtangani oleh VOC. Berkali-kali pulau-pulau yang oleh Buton diklaim sebagai wilayah kekuasaannya dicaplok oleh Ternate dan Gowa (Zuhdi, 2010). Orang-orang Makassar, penduduk utama dan pendukung Kerajaan Gowa, sangat berpengaruh di Buton, seperti tampak pada peristiwa perompakan kapal VOC *Rustenwerk* (*Rust en Werk*) di teluk Baubau pada 1752 (lihat Mourik c.1752) dan beberapa peristiwa lainnya.

Pada tanggal 5 Januari 1613, *Commandeur* VOC Applonius Scotte (atau Schotte), mewakili Gubernur Jenderal VOC yang pertama, Pieter Both (1610-1614), membuat kontrak perjanjian dengan Sultan Dayanu Ikhsanuddin, yang dikenal oleh orang Buton sebagai “*janji baana*” (Zahari, 1977, I:68). Secara ringkas, isi perjanjian itu adalah sebagai berikut (Schoorl, 2003:19-21; Zahari [mengutip Ligvoet], 1977, I:66-68):

---

8 Mengenai pemerintahan Buton di bawah Sultan Dayanu Ikhsanuddin, lihat Nurahyati (2003).

9 Seperti nasib tragis yang dialami oleh satu iring-iringan kapal VOC yang terhempas ke karang dan pecah di perairan Pulau Sagori, gugusan Pulau Kabaena, pada 23 Februari 1650. Para awak kapal itu terdampar di sana sampai 28 Mei 1650 sebelum datang bantuan kapal VOC lain untuk menyelamatkan mereka. *Dagregister* awak kapal itu telah dibahas dengan rinci oleh Hors H. Liebner (2007).

10 Lebih jauh tentang *Perjanjian Bungaya* (*het Bongaais verdrag*), lihat F.W. Stapel (1922) dan Leonard Andaya (1981:100-116, 305-307).

11 Lebih jauh mengenai posisi Buton dalam peta politik regional kepulauan Nusantara bagian timur pada masa VOC, lihat Ligvoet (1878) dan Kielstra (1908). Schoorl (1991), yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (Schoorl 2003, Bab 2), dan Zuhdi (2010), merupakan dua referensi kontemporer terpercaya yang merangkum banyak sumber klasik mengenai Buton.

Yang harus dilakukan VOC untuk Buton	Yang harus dilakukan Buton untuk VOC
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang-orang Belanda [VOC] akan membantu melindungi negeri Buton serta warganya dari penyerbuan-penyerbuan musuh. Untuk itu, di pantai akan dibangun dua buah kubu pertahanan yang diawaki oleh beberapa orang Belanda yang dipersenjatai dengan empat buah meriam</li> <li>2. Scotte berjanji untuk memohon kepada Gubernur Jenderal agar mengirim lebih banyak garnisun serta sebuah kapal atau sebuah kapal layar ke Buton.</li> <li>3. Scotte juga berjanji untuk secepat-cepatnya akan menjadi penengah antara Buton dan Makassar dan meminta Makassar untuk menghentikan semua permusuhan dengan Buton.</li> <li>4. Scotte berjanji untuk mendesak Raja Ternate agar warganya tidak menimbulkan kesusahan bagi Raja Buton atau bagi warga Buton sendiri dan jika ada urusan-urusan, agar diajukan dengan baik-baik kepada Raja Buton melalui para duta atau surat-surat resmi yang dibubuhi cap mohor Kerajaan Ternate.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raja menyatakan telah mengundang orang-orang Belanda untuk melindungi Buton serta turut serta dalam perjuangan melawan musuh-musuhnya, seperti membantu Raja ternate, teman Belanda, yang dengannya Buton juga harus bersahabat.&lt;?&gt;</li> <li>2. Buton berjanji akan membantu Kompeni dalam misi penaklukan ke Solor. Raja Buton juga berjanji tidak akan mengizinkan bangsa-bangsa lain berdagang dan berlalu-lalang di wilayah Buton, jika ini dinilai akan merugikan Kompeni. Sebagai pelindung, Kompeni akan memperoleh hak-hak istimewa.</li> <li>3. Raja Buton berjanji akan menetapkan harga mati untuk barang-barang dagangan dan makanan. Orang Belanda boleh berdagang di mana-mana dalam wilayah Kerajaan Buton tanpa harus dipungut bea apa pun. Mereka juga boleh menanam tanam-tanaman tertentu, asal raja diberi tahu.</li> <li>4. Raja Buton berjanji akan menyuruh warganya menanam padi untuk kebutuhan [orang Belanda] di Maluku.</li> <li>5. Raja Buton berjanji bahwa serdadu-serdadu atau pegawai Kompeni yang lain boleh kawin dengan perempuan Buton, juga anak perempuan bebas/ dari kalangan orang biasa, dan mereka harus diberi tempat tinggal di kerajaan. Para istri mereka boleh masuk Kristen. Kompeni boleh membeli budak laki-laki atau perempuan. Jika ada budak yang melarikan dan mencari perlindungan pada salah satu pihak, maka ia akan dikembalikan kepada pemiliknya atau diganti rugi seharga 10 <i>tanet</i> (kain Buton) untuk setiap budak.</li> <li>6. Raja Buton mengingatkan Kompeni agar memegang teguh janji abadinya dengan Buton. Jika pecah perang antara Belanda dengan Banda, maka Raja Buton akan memanggil saudara laki-lakinya dan serta warganya yang ada di Banda untuk kembali ke Buton.</li> </ol>

Perjanjian Scotte–La Elangi itulah yang mendasari “persekutuan abadi” Buton–Belanda sampai awal abad ke-20. Pieter Both sendiri kemudian datang ke Buton pada 29 Agustus 1613 (*Corpus Diplomaticum*, 1907:104-108) untuk “mempersumpahkan” (mengesahkan) perjanjian itu. Namun, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut menyangkut kandungan EAP212/6/3, kedua belah pihak (Belanda dan Buton) telah melakukan beberapa kali peninjauan kembali terhadap perjanjian itu, yang kemudian mempengaruhi hubungan Buton – VOC. Tentunya ini sesuatu yang wajar karena perjalanan masa memerlukan rekontekstualisasi butir-butir perjanjian tersebut sesuai dengan konstelasi sosial-politik semasa. Sultan-sultan Buton berikutnya ada yang tidak menyetujui atau mematuhi pasal-pasal tertentu dalam Kontrak “Persekutuan Abadi” 1613 itu (juga kontrak-kontrak yang dibuat sesudahnya). Di lain pihak, Kompeni sendiri juga cenderung menambahkan pasal-pasal baru yang menguntungkan mereka. Sebagai contoh, Pieter Both telah menambahkan tiga pasal lagi ke dalam naskah kontrak yang telah disetujui Scotte dan La Elangi, yang tampaknya dimaksudkan untuk dapat mengontrol Buton dengan

lebih ketat lagi. Ketiga pasal tambahan itu adalah: 1) Apabila raja (La Elangi/Sultan Dayanu Ikhsanuddin) wafat, maka anak laki-lakinya yang sah, yaitu Kamaruddin atau Syamsuddin, akan menggantikannya; 2) Semua bangsa asing, kecuali orang Spanyol dan Portugis [musuh bebuyutan Kompeni], bebas berdagang di Buton; 3) Perahu-perahu [lokal] yang berlayar dari Surabaya ke Makassar yang dicurigai membawa barang-barang [dagangan untuk] musuh, boleh diperiksa VOC dengan dihadiri wakil Raja Buton.<sup>12</sup> Barang-barang itu boleh disita dan hasil sitaan itu boleh dibagi antara Raja Buton dan Kompeni (Ligvoet, 1878:33).

Kolofon *EAP212/6/3* berbunyi: “**Tertulis** atas Tanah Mengkasar di dalam kota Rotterdam kepada 25 hari bulan Februari tahun: 1791 pada waktu Isha” (13:11<sup>13</sup>) (Gambar 2b), yang berarti 178 tahun setelah perjanjian Scotte – Sultan Dayanu Ikhsanuddin (La Elangi) dipersumpahkan. Jadi, dalam rentang waktu yang cukup panjang itu, tentulah banyak hal yang berubah dalam hubungan antara Buton dengan Belanda, yang dipengaruhi oleh dinamika sosial politik dan ekonomi kawasan kepulauan Nusantara bagian timur.

### **Butir-butir penting kandungan *EAP212/6/3***

*EAP212/6/3* ditulis oleh Gubernur VOC di Makassar sebagai reaksi atas surat Sultan Azimuddin yang dibawa oleh utusan Syahbandar Raja Kamilanta dan para pengiringnya (beberapa orang menteri, *pengalasan*, dan jurubahasa) yang tiba di Makassar pada “tujuh belas hari bulan November” 1790 (1:8-9<sup>14</sup>). Isi surat tersebut, yang ditulis pada “tiga likur hari bulan Shafar tahun seribu dua ratus lima” (1 November 1790) (1:13), tampaknya merefleksikan pandangan Raja Buton saat itu (Sultan Azimuddin) terhadap VOC yang banyak di antaranya dianggap oleh Kompeni tidak sesuai dengan butir-butir kesepakatan dalam Kontrak Perjanjian antara Buton dengan VOC yang sudah “dipersumpahkan” pada 1766. Setelah membaca surat itulah, otoritas tertinggi VOC di Makassar lalu menulis *EAP212/6/3* yang di dalamnya terkandung tujuh butir penting berikut ini:

1. Kompeni “terlalu amat heran dan tercengang” (1:14) mendapati kenyataan bahwa Sultan Buton yang sekarang, Azimuddin (atau mungkin juga sultan-sultan sebelumnya), mengaku tidak tahu-menahu tentang Kontrak Perjanjian antara Buton dengan VOC 1766. Bagaimana mungkin kontrak bertarikh “22 likur bulan Maret tahun 1766” (1:16-17) itu tidak diketahui dan tidak diakui oleh para pembesar Buton sekarang?
2. Buton belum juga memenuhi segala kewajibannya membayar kerugian atau denda – yang juga sudah diatur dalam Kontrak Perjanjian 1667 dan 1766, dan setelah itu juga sudah ada pula tiga kali peringatan lewat surat (2:10-12) – atas perampokan kapal *Rustenwerk* (*Rust en Werk*) pada tahun 1752.
3. Buton telah “mengeluarkan [memberhenti-kan] atau mengambil [mengangkat] raja [-raja baru]” (3:14) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Kompeni yang jelas-jelas melanggar kesepakatan yang sudah diatur dalam Pasal 7 dan 8 Kontrak Perjanjian 1766.
4. Meriam Kompeni yang “sudah beberapa tahun lamanya tinggal di [dipakai] Buton” belum juga “dipulangkan” (6:12) atau dibayarkan harganya [dikompensasi] dengan budak. Begitu juga dengan “meriam yang tujuh pucuk dan periuk tembaga” (11:10) yang diambil dari sebuah *kici* (kapal) Kompeni yang pecah di perairan Buton, juga belum dibayarkan harganya.
5. Perahu-perahu Buton masih saja berlayar ke tempat-tempat “yang dilarang oleh Kompeni” (6:20), seperti ke Banda (Bandan) dan Ambon. Menurut undang-undang, para pelakunya dapat dihukum (“dikena-<h>kan hukum batang tubuhnya” [6:23]).
6. Pelaksanaan untuk “membunuh [memusnahkan]” (12:3) pohon cengkeh dan pala di Buton ternyata tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

---

<sup>12</sup> Lihat dampak kebijakan ini terhadap aktivitas ekonomi *sea nomad* Bajau di perairan Sulawesi bagian selatan dan sekitarnya pada abad ke-17 dan 18 dalam disertasi Lance Nolde (2014).

<sup>13</sup> Tanda ini merujuk ke halaman naskah aslinya, maksudnya: halaman 13, baris 11. Lihat transliterasi.

<sup>14</sup> Saya belum berhasil mengidentifikasi keberadaan surat ini sehingga belum dapat mengetahui isisnya secara persis. Akan tetapi dengan menganalisa isi surat balasan Kompeni ini, tentu kita dapat mengira-ngira isi surat tersebut.

7. “Karena banyaklah kelakuan [Buton] yang salah” (5:3), maka Kompeni mengancam akan menghukum Buton secara militer, sebagaimana “yang tersebut dalam perkara 9 (Pasal 9)” (9:5) Kontrak Perjanjian 1766.

Itulah butir-butir penting yang dapat disarikan dari kandungan *EAP212/6/3* yang disampaikan oleh otoritas tertinggi VOC di Makassar kepada Sultan Azimuddin yang menjadi raja Buton waktu itu.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai konteks sejarah butir 1: Kontrak Perjanjian Buton dengan VOC Maret 1766. Kontrak ini ditandatangani di markas VOC di Makassar (Ujung Pandang) oleh Raja Bataoga dan beberapa pembesar Buton, mewakili Sultan Kaimuddin<sup>15</sup> atau La Jampi. Redaksi *EAP212/6/3* menyebutkan:

Maka telah sudah jadi dibaharui kepada dua likur 22 hari bulan Maret tahun seribu tujuh ratus enam puluh enam 1766: Seperti sebagaimana biasa, maka raja Bataogah itu melakukan dengan segala orang besar<sup>2</sup> yang adah bersama<sup>2</sup> dengan dia waktu itu membaharui dan bersumpah kepada kontrak itu [...] (4:5-8).

Sultan Kaimuddin sendiri tidak dapat hadir di Ujung Panjang (Makassar) untuk “mempersumpahkan” kontrak perjanjian itu dengan pihak Kompeni. Ketidakhadirannya cukup menjadi tanda tanya, tapi sangat mungkin disebabkan oleh situasi domestik: Buton baru saja pulih dari persoalan politik dalam negerinya menyangkut huru-hara yang terjadi di *Barata Muna* (Zahari 1977, II:141-42). Perjanjian 1766 adalah usaha untuk memperbaharui Perjanjian Persahabatan 25 Juni 1667 yang dikenal dengan Perjanjian (Cornelis) Speelman – (La) Simbata<sup>16</sup> (Zahari 1977, II:142), sebagaimana disebutkan pula dengan terang dalam surat ini:

[M]aka tanah Buton telah sudah menyuruh utusan datang kemari membaharui perjanjian itu dari tahun seribu enam ratus enam puluh tujuh 1667: Maka telah sudah jadi dibaharui kepada dua likur 22 hari bulan Maret tahun seribu tujuh ratus enam puluh enam 1766 (4:4-6).

Kontrak Perjanjian 1766, sebagaimana beberapa kali disebut dalam surat ini, terdiri atas dua bagian: Bagian pertama berisi empat pasal mengenai pembayaran budak sebagai ganti rugi atas perusakan kapal *Rustenwerk*; Bagian kedua (enam belas pasal) mengenai hubungan kedaulatan dan diplomasi Buton dengan VOC (Zuhdi, 2010:230). Redaksi naskah kontrak perjanjian ini yang tersedia dalam dua bahasa – Belanda dan Melayu – dapat dilihat dalam buku Zuhdi (2010: *Lampiran 3*, 311-28). Ada banyak pasal yang sifatnya (makin) mengikat Buton. Mungkin hal itulah yang menyebabkan mengapa beberapa raja Buton yang berkuasa pasca dipersumpahkannya kontrak perjanjian itu terkesan enggan mematuhi.

Akan tetapi menurut Zuhdi (2010:248-53), lahirnya Kontrak Perjanjian 1766 terkait pula dengan instabilitas politik dalam negeri Buton pada masa itu.

Sesudah peristiwa penyerangan ke benteng Woliyo (keraton Sultan Buton) [serangan tahun 1755], Sultan Sakiudin mencoba memperbaiki hubungan Buton dengan VOC. Pada Maret 1756, Sinkelaar<sup>17</sup> dan Rijsweber [petinggi VOC di Makassar] berkunjung ke Buton untuk menawarkan perjanjian baru. Isi pokok [perjanjian itu] terutama mengenai tuntutan (sic) VOC, agar Buton tetap menyerahkan budak sebanyak seribu orang sebagai pembayar ganti rugi [atas perompakan terhadap kapal *Rustenwerk*; lihat uraian berikut]. Sakiudin meninggal dunia pada tahun 1759[,] kemudian

---

15 Biografi singkat Sultan Kaimuddin (aliran bangsawan *Kumbewaha* ke-6), Sultan Buton ke-24 (masa jabatan: 1763-1788), dapat dilihat dalam Zahari (1977, II: 139-47).

16 Perjanjian ini “dipersumpahkan” oleh kedua belah pihak di atas kapal VOC *Thertolen* menyusul dicapainya kesepakatan untuk menghentikan serangan VOC terhadap Buton yang dilakukan oleh Cornelis Speelman dan para sekutunya (Stapel, 1936:41). Pengesahan kontrak perjanjian itu dihadiri pula oleh Sultan Ternate, Mandarsyah, “suatu petunjuk masih adanya pengaruh Ternate di Buton, seperti terlihat dalam Pasal 7 [perjanjian itu]” (Zuhdi, 2010:204). Salah satu butir penting dari perjanjian ini adalah bahwa Buton harus memusnahkan semua pohon pala dan cengkeh di wilayah Kepulauan Tukang Besi yang berada di bawah kekuasaannya, khususnya di Pulau Kaledupa dan Wangi-Wangi. Pemusnahan itu harus di bawah pengawasan Kompeni, dan untuk itu Buton menerima kompensasi 100 ringgit tiap tahun dari Kompeni, yang dikenal sebagai “timpu pala” (Zahari, 1977: II,52-3).

17 Lihat namanya yang disebut-sebut dalam surat (2:5). Cornelis Sinkelaar menjabat sebagai Gubernur VOC di Makassar pada waktu itu. Masa jabatannya: 1759-1766 (Sutherland, 2010:339) (Catatan Suryadi).

digantikan oleh Rafiudin, pu[t]ra Sultan Safiudin yang turun tahta pada tahun 1702. Ia pun tidak lama memerintah[,] lalu diteruskan oleh Sultan Himayatud[d]in, yang memerintah untuk kedua kalinya pada tahun 1760-1763. Pada masa Sultan Kaimudin (m. 1763-1788)[,] pengganti Himayatud[d]in, penawaran kontrak oleh VOC akhirnya diterima Buton, maka ditandatangani kontrak pada 22 Maret 1766. Penggantian beberapa kali Sultan dalam waktu singkat berarti memperlihatkan ketidakstabilan [politik di] keraton Buton. (Zuhdi, 2010:248-249).

Penggunaan kata-kata yang bernada menekan dan mengancam dalam kontrak perjanjian itu merefleksikan tidak adanya kekuasaan mutlak VOC atas Buton (Zuhdi, 2010:250). Dengan kata lain, VOC tidak pernah betul-betul dapat mengontrol Buton secara politis. Oleh sebab itu VOC terus melakukan berbagai siasat agar tetap dapat mengendalikan Buton. Sebagaimana terefleksi dalam *EAP212/6/3*, keberatan Keraton Wolio paling besar ada pada Pasal 8 Kontrak Perjanjian 1766: ketentuan bahwa setiap penggantian (suksesi) raja atau mengangkat raja baru, bahkan juga para pembesar kerajaan, harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Kompeni dan harus mendapat persetujuan dari mereka. Rupanya hal ini merupakan salah satu butir penting penolakan dari Sultan Azimuddin dalam suratnya yang dikirim ke Makassar pada bulan Desember 1790 itu (3:1-5; kursif oleh Suryadi):

**Syahdan** lagi kami bermaklumkan kepada kamu sekalian, tatkala utusan kamu itu datang kemari maka ia masuk kemari bertemu dengan kami kepada suatu hari bulan Desember tahun seribu tujuh ratus sembilan puluh:1790: Maka ia mengadukan kepada kami, *mengatakan itu perkataan kontrak perjanjian di dalam perkara yang ke delapan itu tiada boleh ia dipegangnya dan tiada boleh diturut adanya.*

Bagi VOC pasal ini penting untuk memastikan bahwa siapapun yang menjadi raja Buton tetap berada di bawah pengaruh mereka, meskipun mereka memberi alasan bahwa hal itu dilakukan demi menjaga stabilitas politik dalam negeri Buton. Masalahnya, menurut para pembesar Buton: “[d]ari hal itu pekerjaan yang mengeluarkan raja dan memasukkan raja, jikalau dikehendaki segerah<sup>2</sup> memberi tahu dahulu kepada Kompeni, terlalu amat berat itu kepada kami, tiada boleh diturut, sebab karena adat Tanah Buton jikalau adah raja yang keluar atau mati ta['] dapat tiada ia segera<sup>2</sup> mengambil gantinya raja itu.” (3:7-10). Sedangkan untuk melaporkannya ke Makassar tentu memerlukan waktu yang cukup lama lantaran jaraknya yang cukup jauh dari Baubau.

Akan tetapi, lepas dari masalah tradisi dan soal teknis itu, sebagian kalangan *Kaomu* dan *Walaka* di Buton menganggap soal kewajiban untuk menunggu atau minta “restu” Kompeni dalam setiap pemberhentian atau pengangkatan raja baru di Istana Wolio, tampaknya dianggap sudah merendahkan atau menghina marwah Buton. Apalagi jika diingat bahwa *penabalan* Sultan dilakukan dengan prosesi yang juga menyertakan kita suci Al-Quran (Berg, 1939:472). Sebaliknya, Kompeni menilai tindakan mengingkari kesepakatan itu dianggap sebagai aksi pembangkangan. Itulah yang ditimpakan pada Sultan Azimuddin (La Masalumu). Ia diangkat menjadi Sultan Buton para peralihan tahun 1787 dan 1788 menggantikan Sultan Kaimudin yang mengundurkan diri karena sudah tua dan sakit-sakitan. Sultan Kaimudin memberitahu Kompeni di Makassar tentang calon penggantinya itu. Dan Sultan Azimuddin sendiri pun telah menyurati Kompeni, yang balasannya adalah *EAP212/6/3* yang kita bicarakan ini. Akan tetapi, Kompeni tetap tidak menyukainya, mungkin lantaran ia keberatan dengan Pasal 8 kontrak Perjanjian 1766.

Dua pasal yang lain dalam kontrak perjanjian itu yang juga membuat pihak Buton merasa keberatan adalah Pasal 7 dan Pasal 9. Seperti telah disebutkan di muka, Kompeni beralasan bahwa pasal-pasal itu – Pasal 7, 8, dan 9 – dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik di Istana Wolio: supaya setiap proses suksesi atau pergantian raja tidak menimbulkan konflik politik, supaya “*tiadalah kelak Sultan yang boleh tetap iqrar di atas tahta kerajaannya, meski ia baik perintahnya, meski baik*

*fi'ilnya, karena barang siapa kelak yang kuat iyalah mengaru biru kerajaan itu sehingga ia menjadikan dirinya raja.*" (9:7-9), supaya tidak muncul raja yang otoriter dan mau berkuasa seumur hidup. Akan tetapi Sultan Azimuddin, sebagaimana beberapa pendahulunya, tampaknya menganggap pasal-pasal itu sangat merugikan dan merendahkan martabat Buton.<sup>18</sup>

Inti dari ketiga pasal tersebut ialah: jika raja mangkat ['kedatangan hakim Allah ta'Ala atau pulang ke rahmat Allah ta'Ala], maka para pembesar kerajaan harus berembuk, kemudian wakil mereka harus segera menghadap kepada Kompeni di Betawi, atau setidaknya di Ujung Panjang (Makassar) untuk dilapori (Pasal 7); para menteri dan pembesar Buton tiada sekali-kali boleh memutuskan sendiri calon pengganti raja yang mangkat atau mundur, tapi mesti harus melalui ketok palu Kompeni (Pasal 8); dan jika pihak Buton berani mengubah secara sepihak butir-butir perjanjian yang sudah dipersumpahkan itu dan berani "menyesatkan dirinya akan berseteru dengan Kumpeni", maka Kompeni akan "berbuat sekehendaknya hatinya" (menghukum Buton secara militer), yang akan menimbulkan "kebinasaan [pada] tanah negeri Butun nanti (Pasal 9).<sup>19</sup> Sejarah menunjukkan bahwa pasal ancaman ini tidak membuat takut beberapa sultan Buton, meski membuat keder sebagian dari kalangan bangsawan lainnya dalam lingkungan Istana Wolio.

Berikut penjelasan tentang konteks historis butir 2: penjarahan kapal VOC *Rustenwerk* di Teluk Buton pada tahun 1752. Kisah ini penting untuk dijelaskan mengingat efeknya sangat signifikan dan lama terhadap hubungan VOC dengan Buton sampai beberapa dekade kemudian, seperti terefleksi dalam surat yang kita bahas ini. Sebuah buku klasik karangan Bernadus Mourik memuat secara detil apa yang terjadi terhadap kapal VOC itu ketika berlabuh di Teluk Buton (mungkin di lepas pantai Kamali sekarang) pada sore hari tanggal 28 Juni 1752. Buku karangan Mourik itu berjudul: *Twee-Rampspoedige Zee-reyzen, den eenen gedaan door ...Capitein Morin, met een Fransch Oost-Indisch Compagnie-schip, genaam Le Prince, behelzende een verhaal...op woensdag den 26 April 1752; den anderen met hel Hollandsch Oost-Indische Compagnie schip, genaam Rustenwerk, zynde ten anker leggende, in de Straat en voor het eiland Boeton, door de Mooren en Bokkaneezen, inwoonderen van dat eiland... jammerlyk vermoord geworden enz.; op woensdag den 28 juny 1752* yang diterbitkan di Amsterdam sekitar 1752 (lihat juga Mourik 1750: Lampiran [327]). Buku itu menceritakan kisah nahasnya dua kapal dagang Eropa. Kisah pertama (hlm. 1-14) menceritakan kemalangan yang dialami kapal *Le Prince* milik Perusahaan Dagang Perancis (*Fransch Oost-Indisch Compagnie*) yang dinakhodai "Capitein Morin" yang mengalami kecelakaan, kemudian terbakar, akibat menabrak gosong Turk dekat Pulau St. Michiel karena diterjang badai. Peristiwa itu terjadi pada 26 April 1752 dalam pelayaran *Le Prince* menuju Podichery di India. Kisah kedua – yang lebih relevan dibicarakan di sini – adalah mengenai kapal *Rustenwerk* milik VOC yang diserang di Buton pada 28 Juni 1752, saat Buton diperintah oleh Sultan Himayatuddin (La Karambau). Kisah nahas *Rustenwerk* terdapat pada halaman 16-34, dengan judul "Zee-reyze, Met verhaal nevens het AFLOOPEN van 't HOLLANDSCHE OOST-INDISCHE COMPAGNIE-SCHIP RUSTENWERK, voor 't EILAND BOETON, door de BOKKANEEZEN, in den jaare 1752" (Perjalanan laut, dengan sebuah cerita tentang diserangnya kapal VOC *Rustenwerk* di lepas pantai pulau Buton, oleh orang-orang Bugis pada tahun 1752; Gambar 3).

*Rustenwerk* (yang dibuat tahun 1734) berlayar dari Belanda ke Batavia pada 30 September 1749 (tampaknya pelayaran kali kedua) di bawah komando Kapten Mazius Tetting. Malang tak dapat ditolak, nasibnya berakhir tragis di perairan Buton tiga tahun kemudian. Kisahnya secara singkat adalah sebagai berikut: *Rustenwerk*, dalam perjalanan dari Maluku, singgah di Buton untuk menambah perbekalan dan

---

<sup>18</sup>Salah seorang sultan Buton yang tidak mau tunduk begitu saja kepada kontrak-kontrak perjanjian Buton dengan VOC yang dibuat oleh para pendahulunya adalah Sultan Himayatuddin ibnu Sultanaani Liyaauddin Ismail Muhammad Saydi atau La Karambau (m. 1751-1752 dan 1760-1763). Demikianlah umpamanya, La Karambau menilai "kontrak perjanjian Speelman[-]Simbata adalah suatu penghinaan atas kerajaan Buton [dan juga] menimbulkan kerugian yang mengakibatkan rakyat kerajaan Buton melarat" (Zahari, 1977, II:16). Lebih jauh tentang La Karambau dan keadaan Buton di masa pemerintahannya, lihat Zahari (1977, II:115-118), Zuhdi (2015).

<sup>19</sup> Selengkapnya mengenai ketiga pasal itu, lihat Zuhdi (2010:321-22).

air minum. Pada hari Kamis, 22 Juni, kapal itu mendekati Baubau, ibukota Kerajaan Buton. Semula kapal itu hanya ingin menambah perbekalan dan air minum, kemudian akan meneruskan perjalanan. Namun, pada Jumat 23 Juni rupanya Kapten berhasil mendapatkan kontak dengan seseorang pembantu penting dan orang kepercayaan raja. Berkenaan dengan hal tersebut, Mourik (c.1752:20-21) menulis:

Onze Waterleggers gelaaden hebbende, dagten wy, dat den tyd van ons vertrek aanftaande was, maar onzen *Capitein* hedde daar aangetroffen en Perzoon met name FRANS FRANZ. synde een *Mascaffarfe Vryman*, daar hy nog het befte meede konde fpreken; alzo denzelven op BATAVIA, AMBONA, TERNATE en meer andere Plaatzten in Indiën gezworven hadde, welken *Frans Franz*. dagelyks verkeerden en zelfs zyn intrek hadde by den SABANDAR die de Derde naaft den Koning was, van dat *Eiland*, en magt hebbende van de Koning, om met de EUROPIAANEN te handelen, van 't verhandelen met ons dagelyks *Rapport* aan zynen Meefter bregende. Een dewyl deeze Handeling eenige Dagen duurden, hadden wy, die zomtyds aan Land kwaamen, *Occafie* om di *Eiland* te bezien, en zo wel deszelfs Inwooders, als Gewassen, en Fraaijghedens, & c.[...].

[Setelah mengisi *Waterleggers* kami, kami mengira sudah waktunya untuk berangkat, namun kapten kami telah menemukan seseorang 'preman' Makasar yang bernama FRANS FRANZ, yang paling pantas untuk berkomunikasi; dia telah mengunjungi BATAVIA, AMBON, TERNATE dan tempat lainnya, yang [juga] menjadi tempat tinggal Frans Franz dalam kehidupan sehari-harinya; bahkan, dia dulu [juga] tinggal serumah dengan *syahbandar* yang di pulau itu menjadi orang ketiga di samping raja, dan juga berwibawa seperti rajanya, untuk berdagang dengan orang Eropa; dia [ditugaskan] mengantar kepada majikannya laporan harian tentang interaksi dengan kami. Walaupun peristiwa ini memakan waktu beberapa hari, kami kadang-kadang berkesempatan untuk mendarat dan melihat dan meneliti pulaunya, dan juga penghuninya, tanamannya, atraksinya, dll.]

Mengutip *Rapport Maksser Bijlagen Resolutie 1755-1756*, Zuhdi (2010:212) mengatakan bahwa Frans Franz adalah seorang Bugis mantan *jurubahasa* di Bulukumba yang pernah menjadi "residivis" dan dipenjarakan oleh VOC di Makassar, setelah melakukan suatu perampokan pada 1750. Akan tetapi sumber lain mengatakan ia adalah seorang Belanda yang melakukan pembangkangan terhadap VOC dan lari mendekat ke pihak pribumi. Namanya memang tidak menyiratkan nama pribumi. Frans Franz dan anak buahnya dapat melarikan diri ke Pulau Kabaena dan sepertinya dia dan anak buahnya dilindungi oleh Sultan Himayatuddin. Tindakan Sultan Himayatuddin itu dinilai VOC bertentangan dengan semangat Kontrak 1613 dan 1667. Entah bagaimana caranya, rupanya Frans Franz tiba-tiba sudah berada saja di Baubau ketika *Rustenwerk* sedang singgah di lepas pantai ibukota Kerajaan di Buton itu pada akhir Juni 1752. Mourik (1752:21) melanjutkan ceritanya:

De Zee-Schild-Padden zyn voor dit *Eiland* zeer goed, groot e meenigvuldig, zo dan onze Matroofen, enz. byzonder des Nagts, (als wannen het daar toe den beften tyd is,) zig by aanhoudentheid verluftigden, met dezelve te vangen, en tot eene goede *fpyze*, binnen Boords te brengen; terwyl wy aan de Wal waren, zagen wy veele dingen; als van een Hoogten veele Gebouwen; omtrend een Uur van daar gelegen; vragende, wat voor eene Plaatzte dit was? Kreegen ten antwoord, dan het KALLASUSING genaamt was. De geboorene Zwarte *Eilanders* fpreeken de Maleize Taale, eenige derzelven wat anderen Taalen daar onder mengende, die aaleerende van de Wilde en Woeft Volkeren, die op dat *Eiland* gevonden worden, als BOKKANEZEN, & c. daar men in 't vervolg van fpreeken zal. Den Koning van dit *Eiland* was welgemaakt van Lichaam, maar klein van Poftuur, zo als ook de meesten Inwoonders zyn, dog welgemaakt en rad op de Beenen; zindelyk en net op hunne maniere in de Kleedingen; zeer beleeft tegen de Vreemdelingen, maar daar is iets in hunne *Complimenten*, dat iemand, die daar agt op geeft, geen zin in hun doet hebben; zo als ook de *meeft* van de Inwoonders op die *Eiland* beftaan, dat als zy maar kans zien om Buit te bekoomen, als dan zig aan het dood flaan der *Europaanen* winig kreunen.

[Penyu, yang besar dan banyak, sangat bermanfaat bagi pulau ini, dan juga bagi matros kami, terutamanya waktu malam hari, (yang menjadi waktu yang paling pas); mereka kerap kali suka menangkapnya, mengangkatnya ke dalam perahu, dan memasaknya menjadi hidangan yang sedap; waktu kami mendarat, kami melihat banyak hal, setelah satu jam di jalan, kami sempat bertanya tentang sejumlah bangunan yang tinggi-tinggi: ini tempat apa? Jawabannya, ini adalah KALLASUSING. Penduduk asli yang berkulit hitam berbahasa Melayu, yang dicampur dengan beberapa bahasa yang lain, yang dipelajarinya dari bangsa-bangsa liar dan galak, seperti orang Bugis, dll., yang akan dibahas setelah ini. Raja pulau ini berbadan bagus, tetapi agak kecil tubuhnya<sup>20</sup>, seperti kebanyakan penduduknya, tetapi kakinya bagus dan lincah; sopan dan halus adat dan pakaiannya; sangat beradab terhadap orang luar, tetapi kalau memperhatikan pujian yang [sering] mereka ucapkan, seseorang pasti akan bosan; seperti kebanyakan penduduk pulaunya, mereka sangat mementingkan hasil curian, dan bersedia membunuh orang Eropa untuk mencapainya.]

Jadi, tampaknya kontak pertama antara kedua belah pihak berlangsung lancar dan hangat. Kutipan di atas juga menginformasikan kepada kita bahwa bahasa Melayu sudah biasa dipakai di Buton pada waktu itu, khususnya sebagai media komunikasi dengan orang luar (lihat Niampe, 2012). Oleh karena munculnya rasa optimis, *Rustenwerk* menunda waktu untuk melanjutkan pelayaran. Audiensi dilanjutkan pada keesokan (Sabtu, 24 Juni) harinya di kapal di mana Sultan diwakili oleh Frans Fransz. Agenda pembicaraan utama di antara kedua belah pihak adalah masalah perdagangan. Pertemuan itu diakhiri dengan santap bersama. Hadirin bersulungan untuk kesehatan Sultan dan *Rustenwerk* membuat salvo tujuh kali sebagai tanda salut. Tapi kesepakatan antara kedua belah pihak belum juga berhasil dicapai. Rombongan Frans Fransz balik ke darat dan dilepas oleh *Rustenwerk* dengan lima kali tembakan salvo lagi.

Pada hari Minggu, 25 Juni, negosiasi dilanjutkan dan diteruskan dengan santap bersama lagi. Beberapa jenis barang dijual oleh penduduk kepada awak kapal. Suasana persahabatan tetap tampak antara kedua belah pihak. Tiga hari berikutnya suasana penuh persahabatan itu berlanjut, sampai muncul sesuatu yang agak aneh pada hari Rabu, 28 Juni. Sekitar pukul 3 sore, *Rustenwerk* yang masih lego jangkar di teluk Buton didekati oleh tujuh buah perahu, yang muncul dari muara Sungai Buton, yang penuh berisikan orang-orang Buton dan Bugis. Negosiator Frans Fransz, si *Mascafarfe Vryman* (preman<sup>21</sup> Makassar), ada di dalam salah satu perahu tersebut. Jumlah seluruh awak perahu-perahu itu diperkirakan sekitar 450 orang. Awak *Rustenwerk* Andries Wylander merasa curiga, tapi tak begitu diambil perhatian oleh kapten serta para awak kapal yang lain.

Seperti hari-hari sebelumnya, Frans Fransz dan sebagian pengiringnya diundang naik ke kapal dan bertemu dengan kapten kapal. Ada pembatasan jumlah tamu yang diizinkan naik ke kapal (mungkin karena mulai ada rasa curiga). Sebagian lainnya terpaksa tetap tinggal di perahu yang sudah mengelilingi *Rustenwerk*. Pertemuan antara Frans Fransz dan awak pihak otoritas kapal berlangsung selama 2 jam, diselingi lagi dengan minum-minum (juga minum *wijn*) dan saling bertukar rokok. Namun kesepakatan mengenai kontrak dagang belum juga dicapai oleh kedua belah pihak. Tiba-tiba saja, pada jam 5 terjadi keributan di atas kapal. tampaknya telah terjadi salah paham antara Frans Fransz dengan kapten kapal, yang mungkin disebabkan pula oleh pengaruh alkohol yang telah merasuki darah para perunding dari kedua belah pihak. Frans Fransz dan anak buahnya mengamuk di atas kapal itu. Akhirnya, kedua belah pihak saling menyerang dan membunuh dengan memakai pistol serta senjata tajam.

---

20 Ini agak bertentangan dengan informasi dari sumber-sumber lokal yang mengatakan bahwa La Karambau (Sultan Himayatuddin) – jelas dialah raja yang dimaksudkan di sini – adalah sebuah nama kiasan yang diberikan orang Buton terhadap raja mereka itu yang konon berperawakan tinggi besar seperti kerbau dan bersifat kesatria (Zuhdi, 2010:211) (Catatan Suryadi).

21 Pada masa itu kata *vryman* berarti orang yang bebas, yang tidak mau terikat pada satu institusi atau kekuatan. Makna “bebas” itu masih gayut pada kata *preman* yang dikenal sekarang tapi sudah berkonotasi negatif.



**Gambar 3:** Sampul dalam buku Bernardus Mourik (c.1752) yang menceritakan kisah kemalangan kapal French Oost-Indische Compagnie *Le Prince* yang menabrak karang Turk di dekat Pulau St. Michiel pada hari Rabu, 26 April 1752 (hlm. 1-14) dan kapal Hollandsche Oost-Indische Compagnie *Rustenwerk* yang dijarah oleh orang-orang *Mooren* dan *Bokkaneezen* (orang-orang liar dan orang Bugis) di bawah pimpinan Frans Fransz di teluk Buton pada hari Rabu, 28 Juni 1752 (hlm.16-37) (Courtesy Universiteitsbibliotheek Leiden).

Maka, sebagaimana telah dicatat dalam sejarah, terjadilah peristiwa berdarah di atas *Rustenwerk*, yang membuat hubungan Buton – Kompeni turun ke titik nadir. Mourik (c.1752:25) menulis:

Ondertuffchen doorstak *Frans Franfz.* onzen *Capitein*, met drie fteeken, en deed den zelve, alles met Bloed beplegende, van het *Halverdek* op 't Lyf van eene onzer andere *Officieren* elendig nederftorten, meenende den laatften, met zyn Houwer in de Hand, naar booven ter hulpe toe te fchieten, terwyl de Moordadige *Bokkaneezen* enz. zig in meenigte, alomme door ons Schip verfpredende, met een yffelyk gebrul, *Amoka! Amoka! Drayan! Drayan!* Roepende, en, als gevleesde Duivels, met Sabel en Piftool, op allen, die voor de hand waaren, aanvallende en doodflaande, zynde 'er naar myn befte weeten, omtrent 300 ftuks van dit eerlooze *Canaille*, ten dien gevaarlyke tyde op ons Schip geweeft.

[Sementara itu, *Frans Fransz* menusuk kapten kami dengan tiga bacokan, lalu menjatuhkannya dari *Halverdek* – secara kasar dan penuh darah – ke atas badan salah satu opisir kami yang lain; dia mengira bahwa [temannya] sedang menuju ke atas untuk membantunya dengan membawa pedang; sementara itu orang Bugis yang kejam, dll., telah memasuki kapal kami dengan berteriak-teriak secara mengerikan, *Amoka! Amoka! Drayan! Drayan!*, lalu mereka, sebagai inkarnasi setan, menyerang dan membunuh semua orang yang berada di tempat itu dengan pedang dan pistol; sepengetahuan saya, mereka – yaitu para bangsat bedebah yang keji itu – yang masuk kapal kami pada saat yang berbahaya itu, berjumlah sekitar 300 orang.]

Keadaan di kapal *Rustenwerk* benar-benar menjadi *chaos* dan tak terkendali. Anak buah Frans Fransz makin banyak naik ke kapal dan menyerang dengan membabi buta (Gambar 4). Banyak yang terbunuh dalam peristiwa itu dan para pengikut Frans Fransz menjarah isi kapal itu. Tidak sedikit pula yang terluka dan sebagian jatuh ke laut. Awak kapal yang masih hidup juga disandera sebelum dilepaskan lagi.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Diringkaskan dari Mourik (c.1752).

Akibat peristiwa penyerangan terhadap kapal *Rustenwerk* itu, hubungan Buton dengan VOC menjadi tegang. Kompeni marah besar dan segera mengultimatum Baubau. Dengan dua kapal, *Kaaskooper* dan *Carolina*, VOC mengirim pasukan penghukum ke Buton di bawah komando *onderkoopman* Johan Banelius dan Kapten Melayu di Makassar, Abdul Kadir. Pasukan bantuan dari Tanete dan Bima juga ambil bagian dalam misi itu. Tujuan utamanya: menangkap Frans Fransz, yang disebut oleh R. Blok sebagai “pirate [who] seemed to connive at the capture [of ‘Rest and Work’/Rusten Werk]” (Blok, 1817:96), beserta anak buahnya. Rupanya Frans Fransz dan pengikutnya sudah lebih dahulu menyingkir ke Pulau Kabaena. Johan Banelius dan pasukannya mengejar “preman Makassar” itu ke sana. Terjadilah pertempuran sengit di markas yang sekaligus juga menjadi tempat pelarian Frans Fransz itu. Si Kapten Melayu Abdul Kadir berhasil menewaskan Frans Fransz, tetapi VOC harus membayar mahal karena Banelius ikut tewas dalam pertempuran itu (Zuhdi, 2010:212).



**Gambar 4:** Ilustrasi yang menggambarkan penyerangan kapal *Rustenwerk* yang sedang lego jangkar di teluk Buton oleh *Macaffaren Vryman* ('preman Makassar') Frans Fransz dan pengikutnya pada hari Rabu, 28 Juni 1752 (Sumber: Mourik c. 1752: di muka hlm. 26) (Courtesy Universiteitsbibliotheek Leiden).

Lama kemudian Kompeni tak kunjung mendapat penjelasan dari Buton tentang penyerangan kapal *Rustenwerk* itu. Markas VOC di Makassar lalu mengutus Johan Casper Rijsweber ke Baubau untuk memberi peringatan lagi. Jika utusan Sultan tidak segera datang ke Makassar, Buton akan dijatuhi hukuman yang lebih keras lagi melalui serangan militer. Sultan Himayatuddin yang berani itu tampaknya tak menghiraukan ancaman Fort Rotterdam.<sup>23</sup> Namun, kalangan bangsawan Buton tampaknya cukup panik. Mereka tidak ingin terjadi pertumpahan darah di Buton. Sultan Himayatuddin mencoba meminta bantuan kepada Raja Bone dan Ternate, tapi tidak mendapat tanggapan (Blok, 1817:97). Sultan Himayatuddin mendapat tekanan dari dalam: kalangan *kaomu* dan *walaka* di sekitar Istana Wolio memintanya untuk mundur dari kekuasaannya. Sultan Himayatuddin yang mencintai rakyatnya menyanggupi permintaan kaum *kaomu* dan *walaka* itu. Ia dimakzulkan dari tahtanya dan digantikan oleh iparnya Sultan Sakiuddin.<sup>24</sup> Namun, penggantian sultan itu tidak membuat hubungan Buton dengan VOC segera membaik. VOC menduga La Karambau tetap berkuasa dan pengaruhnya tetap besar dalam lingkungan Istana Wolio.

<sup>23</sup> Uraian bagian ini dan paragraf selanjutnya merujuk kepada Zuhdi (2010:213-27).

<sup>24</sup> Sultan Saki[y]Uddin atau Sangia Wolowa (nama kecilnya Hamim) memerintah dari tahun 1752-1759. Beliau berasal dari aliran bangsawan *Kumbewaha* yang ke-4. Lebih jauh tentang beliau, lihat Zahari, (1977: II, 119-32).

Sultan Sakiuddin disodori VOC dua perjanjian: pengukuhan kembali Perjanjian 1667 dan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami Rustenwerk dengan budak: VOC meminta 1000<sup>25</sup> orang budak. Sultan tampaknya tak sanggup memenuhi permintaan VOC itu sekaligus. Sebanyak 80 orang budak, kebanyakan sudah tua-tua, disetor ke Makassar menyertai kunjungan utusan Buton ke markas VOC itu pada 25 Desember 1754. Sebelumnya, sudah dikirim pula 72 budak beserta sejumlah emas dan perak. Telah berlangsung pula tiga kali korespondensi antara Baubau dan Makassar untuk mengurangi ketegangan pasca penyerangan kapal Rustenwerk itu.

Akan tetapi VOC tidak puas juga. Buton dinilai tidak serius, dan tampaknya hukuman militer akan segera dijatuhkan. Pada tanggal 19 Februari 1755 kapal-kapal VOC yang dikomandoi J.C. Rijsweber menyerang Baubau. Perang bertabur darah terjadi antara kedua belah pihak. Banyak rakyat Buton tewas dan yang mengungsi. Beberapa petinggi Buton dari golongan *kaomu* dan *walaka* juga tewas. Kerugian uang dan nyawa manusia besar sekali.<sup>26</sup> Inilah salah satu episode yang memilukan dan akibatnya, terpendam jauh ke dalam memori kolektif masyarakat Buton. Zuhdi (2010;2015) menggambarkan periode perang ini secara detil, dengan mengutip sumber-sumber lokal, khususnya naskah *Kabanti Ajonga Inda Malusa* ('Pakaian yang tidak luntur') yang ditulis oleh H. Abdul Ganiu yang hidup pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-29, La Ode Muhammad Idrus Kaimuddin.<sup>27</sup> Serangan brutal VOC itu kemudian dihentikan karena ada sinyal kompromi dari Istana Wolio.

Pada 8 Agustus 1756, Rijsweber dan Sinkelaar datang lagi ke Buton. Mereka masih menuntut 1000 orang budak sebagai ganti rugi atas penyerangan kapal *Rustenwerk* oleh Frans Fransz dan anak buahnya. Sultan Sakiuddin minta tenggang waktu dan keringanan.

Rekaman sejarah ini dapat disingkat dengan "melompat" ke pengesahan Kontrak Perjanjian 1766, sekitar 10 tahun setelah penyerangan VOC ke Baubau itu. Sebagaimana telah disebutkan di muka, ketika itu Buton sudah dipimpin oleh raja yang lain, yaitu Sultan Kaimuddin atau La Jampi. Jelas nada kontrak itu adalah untuk "meneguhi" dan "menguatkan akan persaudaraan kita [Kompeni-Buton] sebagaimana yang telah sudah ada itu"<sup>28</sup> yang sempat "rusak" karena peristiwa *Rustenwerk*. Persumpahan kontrak itu disaksikan pula oleh Raja Bone. Dalam pengantar kontrak itu, Kompeni masih menyinggung "kesalahan" yang sudah diperbuat Sultan Buton (tentu maksudnya La Karambau) yang "*memberi malu kepadanya dan lagi ditaruhnya di bawah tapak kaki akan perjanjian kami [VOC] yang sudah diperbuat dengan segala raja-raja yang dahulu-dahulu ditaruhnya oleh raja yang sudah mengangkat sampai atas Qur'an bukannya sebab kekurangan Kompeni.*" (Kontrak 1766 dalam Zuhdi, 2010:315-16). Kontrak itu masih juga menyebut-nyebut "orang yang lima ratus", yang tampaknya merupakan sisa budak yang masih harus disetor oleh Buton kepada Kompeni sebagai ganti rugi atas penjarahan terhadap kapal *Rustenwerk*. Jika merujuk kepada butir 3 isi surat, sebagaimana disebutkan di muka, maka berarti sampai 1791, utang 1000 budak yang diminta VOC sebagai ganti rugi atas penyerangan terhadap kapal *Rustenwerk* yang terjadi tahun 1752 belum juga mampu dilunasi Buton.

Butir 4 isi surat – soal meriam-meriam dan barang-barang milik Kompeni yang ada di Baubau, baik karena dipinjamkan maupun karena diambil dari kapal VOC yang mendapat kecelakaan – tampaknya juga menjadi ganjalan serius dalam hubungan VOC dengan Buton. Dalam konteks ini tampak sekali sifat Belanda: untung boleh, tapi rugi tidak mau. Menurut Pasal 12 Kontrak Perjanjian 1766, Raja Buton harus menolong sembarang kapal Kompeni yang lalu, singgah untuk menambah perbekalan, atau tersangkut [mengalami kecelakaan] di Buton (Kontrak 1766 dalam Zuhdi, 2010:324). Saya belum berhasil mengidentifikasi *kici* (kapal) Kompeni yang pecah di perairan Buton, yang isinya diambil oleh orang-orangnya Sultan Buton, yang disebut-sebut dalam surat ini. Tampaknya, peristiwa kecelakaan *kici* itu mungkin belum lama terjadi (mungkin akhir 1780-an), sebab dikatakan: "*kici yang baharu2 ini pecah adanya*" (6:13; kursif oleh Suryadi).

---

25 Zuhdi (2010:214[*Catatan 19*]) mengatakan bahwa dokumen tentang jumlah budak sebagai ganti rugi atas penyerangan kapal *Rustenwerk* ini tidak pernah ditemukan. Namun, surat Kompeni kepada Sultan Azimuddin yang kita bahas ini dengan jelas menyebutkannya: "[*m*]eminta seribu 1000: kepala budak pembayarannya kerugian Kompeni kepada kapal yang bernama *Rustenwerk*" (3:20-21).

26 Lebih jauh tentang penyerangan VOC atas Buton ini dan efek sosial-politik dan ongkos finansialnya, lihat Zuhdi (2010:215-227) dan Zuhdi (2015).

27 Lebih jauh tentang teks ini, lihat antara lain Niampe (1999) dan Rosdin (2015).

28 Kutipan-kutipan dari teks Kontrak 1766 ini merujuk kepada Zuhdi (2010: 311-328).

Butir 5 isi surat jelas terkait dengan kontrol VOC atas laut dalam upaya mempertahankan dominasinya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Akses perahu-perahu Buton untuk melayari berbagai tempat di bagian timur Kepulauan Nusantara dikontrol oleh VOC dengan keharusan untuk memiliki “surat pas”. Kewajiban untuk mengantongi “surat pas” ini diterapkan menyusul kemenangan VOC atas Gowa pada 1669 yang kemudian memberi akses seluas-luasnya bagi mereka untuk mengontrol dan mengawasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Seperti dikatakan Lance Nolde (2015:6; kursif oleh Suryadi), “*Gowa’s defeat also resulted permanent Dutch presence in South Sulawesi and the creation of a system of port-control, maritime patrols, and sailing passes designed to regulate and restrain the movement of people and goods between Makassar and other areas of the Indo-Malay archipelago.*”

Butir 6 isi surat terkait erat dengan Pasal 1 Kontrak 1766, yaitu keharusan bagi Buton untuk “membunuh” (memusnahkan) pohon-pohon pala dan cengkeh di “*atas sekalian pulau-pulau Tukang Besi yang takluk di bawahnya itu dan lagi demikian [Pulau] Ka[l]jedupa dan Wanci*”, dan juga di Pulau Binongko. Sebagai kompensasinya, Kompeni membayar 100 riyal per tahun kepada Sultan Buton. Tapi riyal hanya “*akan dibayar[kan] jikalau Kumpeni sudah membunuh pohon-pohon sekalian itu.*” (Kontrak 1766 dalam Zuhdi, 2010:317). Isu pemusnahan pohon-pohon cengkeh dan pala ini masih muncul dalam surat ini, yang nota bene sudah berjarak 35 tahun sejak Kontrak 1766 dipersumpahkan. Jadi, sebagaimana dikatakan Zuhdi (2010:242-48), proses pemusnahan pohon rempah-rempah itu tidak mudah, banyak kendala ditemukan di lapangan, antara lain karena wilayah-wilayah tempat pohon-pohon pala dan cengkeh itu ditanam sangat jauh dan sulit dijangkau dan juga karena banyak penduduk menghalang-halangi orang-orang yang ditugaskan oleh VOC untuk melaksanakan tugas itu.

Butir 7 lebih merupakan repetisi dari nada ancaman yang sudah disebutkan dalam Pasal 9 Kontrak 1766. Jika kita amati lebih jauh, ini semacam gaya Belanda tulen (yang masih dipraktekkan di zaman modern ini) dalam berhubungan dengan rakyat dari negeri-negeri yang mereka anggap lemah dan lebih rendah dari mereka. Zaman *Hakeruna Walanda* (1755) jelas salah satu perwujudan dari ancaman ini. Pihak VOC menyebutnya sebagai “hukuman” terhadap Buton karena melanggar kontrak perjanjian yang sudah dipersumpahkan. Sebelum perang 1755, sudah beberapa kali Buton diserang/dihukum oleh “sekutu abadi”nya itu (lihat Zuhdi, 2010:200-203). Intinya: jika VOC merasa dirugikan, Buton akan menerima ganjarannya dalam bentuk serangan militer.

## Tentang Sultan Azimuddin

Abdul Mulku Zahari dalam tiga jilid bukunya yang menceritakan raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Buton (Zahari, 1977: I, II, III) tidak menyebut nama Sultan Azimuddin. Di akhir Jilid II (hlm.148-56) ia menjelaskan Sultan Alimuddin (La Masalumu), Sultan Buton ke-25, yang memerintah antara 1788-1791. Selanjutnya, dalam Jilid III, halaman 13-20, ia menjelaskan Sultan Buton ke-29, Muhuyuddien Abdul Gafur.<sup>29</sup> Merujuk kepada surat yang kita bahas ini, dikatakan bahwa Sultan Azimuddin mengirim surat ke Makassar pada 1 November 1790 (1:13). Ini berarti bahwa Azimuddin lah yang menjadi Sultan Buton yang sah pada waktu itu. Sementara Zahari (1977, II:148) – yang juga dirujuk oleh Zuhdi (2010: *Lampiran 5*, 334) – mengatakan pada tahun itu yang memerintah adalah Sultan Alimuddin. Perbedaan nama ini – Alimuddin dan Azimuddin sedikit membingungkan. Apakah keduanya adalah orang yang sama? Namun, uraian Zuhdi mengindikasikan bahwa Sultan Azimuddin dan Sultan Alimuddin memang adalah raja yang sama.

Pada peralihan tahun 1787 dan 1788, karena sudah tua dan alasan sakit, Sultan Kaimuddin mengundurkan diri dari jabatannya. Sebagai penggantinya ditunjuk La Masalumu bergelar Sultan Azimuddin. Sesuai dengan bunyi Pasal 8 [Kontrak Perjanjian 1766], [Sultan] Kaimuddin memberitahukan [pengunduran dirinya, tapi belum menyebut dengan jelas calon penggantinya] kepada Kumpeni di Makassar (Zuhdi, 2010:251-52)

---

<sup>29</sup> Tentang surat-surat Sultan Muhuyuddien Abdul Gafur, lihat Suryadi 2007a.

Uraian Ab. Razak dkk. (2011:29,32) juga menunjukkan bahwa Sultan Alimuddin dan Sultan Azimuddin adalah raja yang sama, sebagaimana halnya juga disebut oleh Hafisah dan Kramadibrata (2018:400). Yang pasti adalah bahwa Sultan Azimuddin/Alimuddin memang tidak disukai Kompeni. Redaksi *EAP212/6/3* mengatakan bahwa “[n]iscaya Tuan Jeneral dan segala Rat van India di Betawi tiada ia mau menjadikan raja di Buton itu Sultan Azimuddin, akan tetapi ia berkirim surat kemari di Mengkasar, [...]” (10:3-4). Ini mengindikasikan bahwa Batavia tidak menghendaki Azimuddin menjadi raja Buton, walaupun setelah ditabalkan menjadi Sultan Buton ia segera mengirim surat pemberitahuan ke Makassar. Memang surat pemberitahuan itu tampaknya agak terlambat dikirim kepada otoritas tertinggi VOC di Fort Rotterdam, sebab pada bulan Februari 1791, VOC dan para bangsawan di Istana Wolio yang menjadi sekutunya sudah “berembuk”, yang akhirnya melahirkan Kontrak Perjanjian 1791.

Tampaknya, alasan penolakan VOC terhadap Sultan Azimuddin lebih karena ia, sebagaimana halnya pendahulunya La Karambau, cukup tegas, punya harga diri, dan tidak mau tunduk begitu saja kepada pasal-pasal kontrak perjanjian yang sudah dipersumpahkan oleh para pendahulunya, khususnya Kontrak Perjanjian 1766. Zuhdi (2010:253), dengan mengutip redaksi Kontrak Perjanjian 1791 (tak lama kemudian Sultan Azimuddin dilengserkan), menunjukkan bahwa “*raja yang baru di Buton itu yang bernama Sultan Azimud[d]in...dan sekalian wazir menteri-menterinya...tiada melakukan sentiasa perkataan sebagai yang telah tersebut di dalam [kontrak] perdamaian yang telah dibuat dahulu-dahulu itu adanya.*” Zuhdi mensinyalir telah terjadi perpecahan di kalangan bangsawan Buton menyusul lengsernya Sultan Kaimuddin, yang berpotensi membahayakan keutuhan kerajaan. Friksi di kalangan elite Buton itu tampaknya lebih terkait dengan adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi kontrak-kontrak perjanjian dengan VOC, sesuatu yang sebenarnya sudah berulang terjadi dalam lingkungan kaum bangsawan Buton. Keadaan yang cukup genting itu “mendorong VOC lebih kuat [lagi] untuk mencampuri urusan penggantian Sultan Buton. Pada saat Kontrak Perjanjian 19 Februari 1791 dibicarakan dan kemudian disepakati, kejatuhan Sultan Azimud[d]in yang tidak direstui VOC, tinggal menunggu hari saja” (Zuhdi, 2010:252). Sejarah telah mencatat bahwa pada akhir tahun itu juga (sangat mungkin setelah bulan November 1791, sebab surat yang kita bahas ini, yang dikirim pada bulan ini, masih ditujukan kepada Sultan Azimuddin) sang Sultan (di)turun(kan) dari tahtanya, digantikan Sultan Muhuyuddien Abdul Gafur yang, berdasarkan analisa saya terhadap surat-suratnya kepada VOC (Suryadi, 2007a), sangat “penurut” dan patuh kepada Kompeni.

### 3. KESIMPULAN

Surat Kompeni kepada Sultan Buton Azimuddin *EAP212/6/3*, yang latar belakang sejarahnya sudah dipaparkan dalam makalah ini, memberikan beberapa refleksi kepada kita tentang situasi Kerajaan Buton pada akhir abad ke-18.

Kasus perusakan dan penjarahan kapal *Rustenwerk* yang terjadi pada bulan Juni 1752 berdampak panjang dan cukup buruk pada hubungan Buton dengan VOC. Akibat peristiwa itu, Buton diserang oleh VOC secara besar-besaran pada 1755, yang menimbulkan kepiluan di pihak Buton karena beberapa petinggi kerajaan dan banyak rakyat tak berdosa mati. Hampir empat dekade setelah peristiwa nahas itu, kasus *Rustenwerk* masih tetap mengganjal hubungan Buton dengan VOC. Tak pernah tuntasnya masalah itu dikarenakan Buton sulit memenuhi kompensasi sebanyak 1000 orang budak yang diminta VOC.

Dengan membandingkan pasal-pasal beberapa kontrak antara Buton dengan VOC, dapat dikesan bahwa Belanda terus berusaha mempersempit ruang gerak sultan-sultan Buton. Pasal-pasal tambahan atau yang diubah lebih cenderung menguntungkan Belanda ketimbang Buton. Ini mengingatkan kita pada pepatah Melayu “Seperti Belanda minta tanah” atau “Dikasih hati minta jantung”. Belanda terus mendesakkan keinginannya terhadap Buton. Dalam konteks ini, dapat dipahami mengapa beberapa orang sultan Buton yang merasa masih punya harga diri dan martabat tidak mau tunduk begitu saja kepada kontrak-kontrak perjanjian yang telah dibuat oleh para pendahulunya dengan Kompeni itu. Sultan Azimuddin adalah salah seorang di antaranya, di samping pendahulunya, La Karambau (Sultan

Himayatuddin), yang sangat tegas menjunjung *dignity* Kerajaan Buton. Peristiwa *Rustenwerk* terjadi di ujung masa pemerintahannya yang pertama.

Sampai batas tertentu, ada kesan bahwa persepsi terhadap kontrak-kontrak perjanjian tertulis berbeda antara orang Eropa (dalam hal ini Belanda) dan orang pribumi (dalam hal ini para bangsawan dan raja-raja Buton). Lebih jauh ini mungkin menyangkut kontras antara tradisi literasi (*literacy*) Barat yang sudah begitu kuat hidup dalam budaya Belanda satu pihak dan kelisanan (*orality*) yang menjadi ciri umum etnis-etnis yang hidup di Kepulauan Nusantara di lain pihak. Redaksi EAP212/6/3 menyiratkan bahwa pihak Buton sering tidak mengindahkan kontrak-kontrak tertulis yang sudah dibuat, seperti ada kesan bahwa jika sebuah kontrak perjanjian dipersumpahkan oleh seorang raja, maka itu tidak berarti bahwa raja yang lain (suksesornya) wajib mengikutinya. Memang harus diakui bahwa ada pula pihak-pihak yang memegang teguh setiap perjanjian yang sudah dibuat dengan Kompeni. Juga ada kesan bahwa rakyat Buton tidak merasa langsung terikat dengan pasal-pasal kontrak-kontrak perjanjian tertulis yang dibuat oleh golongan elite mereka dengan VOC. Ini antara lain terefleksi dalam kasus sulitnya melaksanakan pemusnahan pohon-pohon cengkeh dan pala di Kepulauan Tukang Besi, yang mestinya dilakukan mengikut Pasal 1 Kontrak Perjanjian 1766, karena rakyat acuh tak acuh saja dan malah banyak yang menghalangi.

Sampai batas tertentu kontrak-kontrak perjanjian antara Buton dengan VOC mempengaruhi pola hubungan politik di kalangan kaum bangsawan Buton. Walau tidak bisa dibuat garis batas yang tegas, dapat dikatakan bahwa kalangan *kaomu* dan *walaka* cenderung terbelah dalam menyikapi kontrak-kontrak perjanjian yang dibuat dengan VOC.<sup>30</sup> Namun demikian, walau sering terjadi gejolak dalam lingkungan Istana Wolio akibat perbedaan perspektif dalam menyikapi kontrak-kontrak yang cenderung disetir oleh Kompeni itu, tapi hal itu tidak sampai menimbulkan perang saudara dan perpecahan serius di kalangan bangsawan Buton yang mengancam keutuhan kerajaan.<sup>31</sup> Dalam kaitannya dengan hal ini, menarik apa yang disebut oleh Zuhdi (2010:221) sebagai perasaan menyalahkan diri sendiri yang dirasakan oleh orang Buton bila mendapat “hukuman” dari VOC. Ini dihubungkan dengan sikap elite Buton yang menganggap diri sendiri sebagai “anak” dan Kompeni sebagai “ayah”, walaupun konsep itu, sejauh analisa saya melalui surat-surat Sultan Muhuyuddin Abdul Gafur kepada VOC (Suryadi, 2007a), sering pula dimanfaatkan oleh Buton untuk mengakali Kompeni, misalnya meminta tanggung jawab sang “ayah” untuk mengirimkan senapan, obat bedil (mesiu), meriam, teropong, dan barang berharga lainnya untuk dikirimkan ke Istana Wolio. Logikanya: seorang “ayah” tentu mau memenuhi permintaan sang “anak”, kalau ia memang mencintainya.

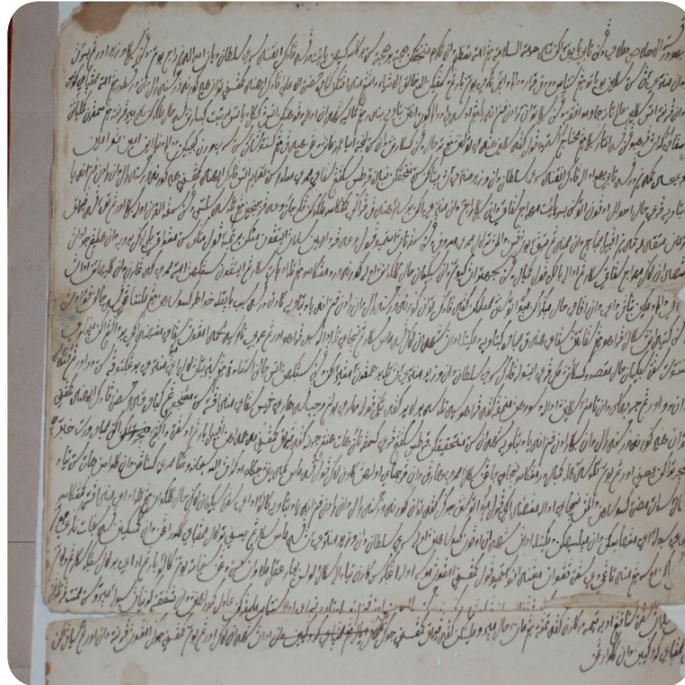
Akhirnya kita harus mempertimbangkan: di mana Sultan Azimuddin/ Alimuddin yang masa kekuasaannya cukup pendek (karena tekanan Belanda) itu kita tempatkan dalam kerangka sejarah Buton? Kalau saya dimintai pendapat, bagi saya beliau adalah seorang pemimpin Buton (bersama La Karambau), yang tahu akan harga diri dan martabat rakyat Buton dan tidak mau diatur begitu saja atau dicucuk hidungnya oleh kekuatan asing (VOC). Untuk pemimpin seperti itu, orang Buton di zaman kini tentu dapat memikirkan di mana marwah beliau akan ditempatkan.

---

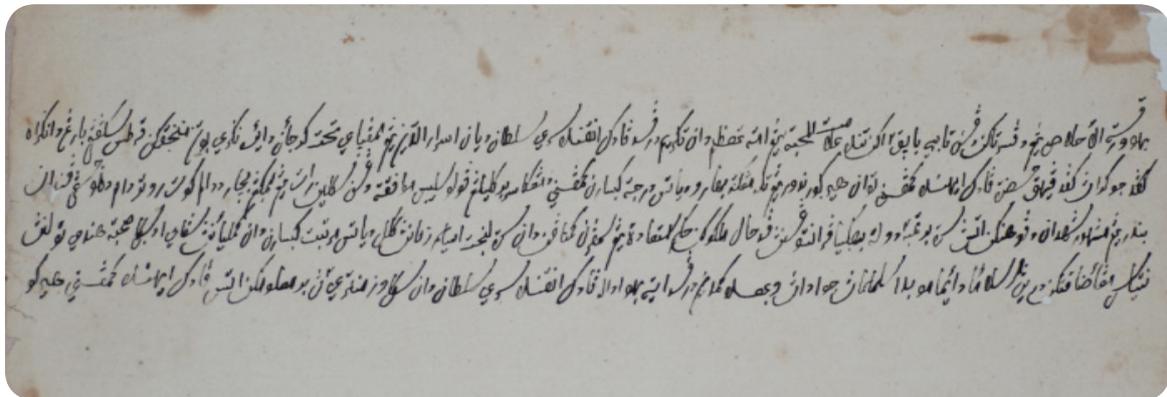
30 Yang masih kurang diketahui adalah posisi para ulama dalam menyikapi kontrak-kontrak ini. Secara teoretis, mestinya mereka bersikap kontra terhadap setiap kebijakan yang dianggap pro atau memfasilitasi VOC. Namun, hal ini tidak begitu tampak di Buton, walaupun Islam sangat kuat mempengaruhi atmosfer kehidupan kaum bangsawan dan orang awam di kesultanan itu (Junus, 1995a,b; Niampe, 2011; Cop-penger, 2011; Rosdin, 2014).

31 Menurut hemat saya, sistem pemerintahan tradisional Buton adalah salah satu yang terbaik di Nusantara. Sistem pembagian jatah kekuasaan antara *kaomu* dan *walaka* mampu mereduksi terjadinya konflik politik di kalangan elite Buton. Memang beberapa kali terjadi friksi dan ketegangan yang cukup mengkhawatirkan, tapi akhirnya dapat diselesaikan tanpa harus terjadi perang saudara sebagaimana sering terjadi di banyak kerajaan lokal di Jawa. Faktor-faktor lain tentu juga berpengaruh, seperti mekanisme sistem *pangka* yang relatif fleksibel, dan juga karena posisi Buton yang secara geopolitik terus merasa terancam oleh dua kerajaan besar tetangganya: Gowa dan Ternate, yang mungkin menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk tetap bersatu ketimbang berbalah. Sejarah telah mencatat bahwa selama lebih kurang 5 abad, Kerajaan Buton relatif tetap utuh, sebelum bergabung secara sukarela dengan Republik Indonesiapada pada tahun 1960.

#### 4. GAMBAR-GAMBAR



Gambar 5: Surat kedua yang berbeda (halaman 14) yang terkandung dalam EAP212/6/3: Surat Sultan Dayan Asraruddin kepada Kompeni.



Gambar 6: Surat ketiga yang tidak lengkap (halaman 15) yang terkandung dalam EAP212/6/3: Surat Sultan Dayan Asraruddin kepada Kompeni.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Razak, Ab. Karim dkk. 2011. *Masyarakat Melayu Buton: kilauan khazanah manuskrip, kesenian, budaya, bahasa dan pantunnya*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
- Andaya, Leonard. 1981. *The heritage of Arung Palakka*. De Hague: Martinus Nijhoff (*Verhandelingen* 91).
- Berg, E. J. van den. 1939. "Adatgebruiken in verband met de sultanistallatie in Boeton", *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, 79: 469-528.
- Blok, R. (Mr.). 1817. *History of the island of Celebes*, Vol.1 (Book XVI). Calcutta: Calcutta Gazette Press.
- Chijs, J. A. Van der (Mr.). 1886. *Nederlandsch-Indisch plakaatboek, 1602-1811*, Tweede Deel. Batavia: Landsdrukkerij; 's Hage: M. Nijhoff.
- Cense, A.A. 1954. "Mededelingen uit de verslagen van Dr E.J. van den Berg; Taalambtenaar op Buton 1936-1941", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 110(2): 154-184.
- Coppenger, Caleb. 2011. *The mysteries of the islands of Buton: According to the old men and me*. San Diego: Aventine Press.
- Corpus Diplomaticum*. 1907. *Corpus diplomaticum Neerlandico-Indicum*. Jilid 1. Ed.: J. E. Heeres. 's-Gravenhage: Nijhoff.
- Fraasen, Ch. F. Van. 1987. 'Ternate, de Molukken en de Indonesische archipel: Van Soa-organisatie en vierdeling: Een studie van traditionale samenleving en cultuur in Indonesie', Vol. I [Disertasi PhD, Universiteit Leiden].
- Hafisah, Aghna Okta dan Dewaki Kramadibrata. 2018. "The Dutch East India Company's letter to Sultan Azimuddin of Buton", *Advances in Social Sciences, Education and Humanities Research*, Vol. 280: 398-404.
- Ikram, Achadiati, Tjiptaningrum Fuad Hassan, dan Dewaki Kramadibrata. 2001. *Katalog naskah Buton koleksi Abdul Mulku Zahari*. Jakarta: Masyarakat Pernaskahan Nusantara – Yayasan Obor Indonesia.
- Katkova, Irina R. 2011. "The cultural crossroads: St. Petersburg, Batavia, Amsterdam", *The [IIAS] Newsletter*, No. 58/Autumn/Winter: 10.
- Kielstra, E. B. 1908. "Het Sultanaat van Boeton", [overdruk uit] *Onze Eeuw*, 8(1): 452-472.
- Liebner, Hors. H. 2007. "Sebuah manuskrip Belanda mengenai kemalangan armada VOC di Pulau Kabaena, Mac – Mei 1650", *Jurnal Sari*, 25: 51-83.
- Ligvoet, A. 1878. "Beschrijving en geschiedenis van Boeton", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 26(1): 1-112.
- Mourik, Bernardus. 1750. *De schandere Hollandsche koop-handelaar, onderwyzende veele zaaken en geheimen nut, gemak en voorzetting van den Koophandel*. Amsterdam: Bernadus Mourik.
- Mourik, Bernardus. [c.1752]. *Twee-Rampspoedige Zee-reyzen, den eenen gedaan door ...Capitein Morin, met een Fransch Oost-Indisch Compagnie-schip, genaam Le Prince, behelzende een verhaal... op woensdag den 26 April 1752; den anderen met hel Hollandsch Oost-Indische Compagnie schip, genaam Rustenwerk, zynde ten anker leggende, in de Straat en voor het eiland Boeton, door de Mooren en Bokkaneezen, inwoonderen van dat eiland...jammerlyk vermoord geworden enz.;* op woensdag den 28 juny 1752. Amsterdam: Bernardus Mourik.
- Niemeijer, Hendrik E. et al. 2015. *The diplomatic correspondence between Asian rulers and Batavia Castle during the 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> centuries: The digital reconstruction of a lost treasure*. Jakarta: ANRI/TCF.

- Niampe, La. 1999. "Nasihat Haji Abdul Ganiu kepada Sultan Laode Muhammad Idrus Qaimuddin: analisis berdasarkan naskah Kabanti "Ajonga Inda Malusa" [Makalah Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara III, 12-13 Oktober 1999].
- Niampe, La. 2011. "Unsur tasawuf dalam naskah Undang-undang Buton", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 9(1): 63-92.
- Niampe, La. 2012. "Bahasa Melayu di Kerajaan Buton (Studi berdasarkan naskah kuno koleksi Abdul Mulku Zahari di Buton)", *Bahasa dan Seni*, Tahun 40, No. 1 (Februari): 14-25.
- Nolde, Lance. 2014. 'Changing tides: A history of power, trade, and transformation among the Sama Bajo sea peoples of Eastern Indonesia in the early modern meriod' [disertasi PhD, University of Hawai'i at Manoa].
- Nolde, Lance. 2015. "Strange people", *The [IIAS] Newsletter*, No.70/Spring: 6-7.
- Nurhayati. 2003. 'Sistem pemerintahan Kesultanan Buton pada masa kepemimpinan Dayanu Ikhsanuddin' [Thesis Master Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta].
- Parthesius, Robert. 2010. *Dutch ships in tropical waters: The development of the Dutch East India Company (VOC) shipping network in Asia, 1595-1660*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Putten, Jan van der. 2001. *His word is the truth: Haji Ibrahim's letters and other writings*. Leiden: Research School of Asian, African, and Amerindian Studies [CNWS Publication, Vol. 104].
- Rosdin, Ali. 2014. "Aspek kultural 'Bismillahirrahmanirrahim' dalam keislaman orang Buton: kajian terhadap Kabanti Ajonga Inda Malusa", *El-Harakah; Jurnal Penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 16(1): 81-99.
- Rosdin, Ali. 2015. 'Nilai-nilai kehidupan masyarakat Buton: kajian filologi dan sosiologi sastra serta suntingan teks dan terjemahan terhadap naskah *Kabanti Ajonga Yinda Malusa*' [Disertasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta].
- Schoorl, Pim. 1991. "Het 'eeuwige' verbond tussen Buton en de VOC, 1613-1669", in: H. J. Poeze dan Pim Schoorl (Eds.), *Excursies in Celebes: een bundel bijdragen het afscheid van J. Noorduyt als directeur-secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*, hlm. 21-61. Leiden: KITLV Uitgeverij.
- Schoorl, Pim. 2003. *Masyarakat, sejarah dan budaya Buton*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Shellabear, W.G. 1898. "An account of some of the oldest Malay MSS. Now extant", *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, 31: 107-151.
- Song, Seung-Woon. 2018. "Origin narratives, origin structures, and diarchic system of Buton kingdom, Indonesia". *Indonesia and the Malay World*, 46(135): 135-153.
- Stapel, F.W. 1922. *Het Bongaais verdrag*. Leiden: University of Leiden.
- Stapel, F.W. 1936. "Cornelis Janszoon Speelman", *Bijdragen tode Taal-, Land- en Volkenkunde*, 94(1): 1-169.
- Stapel, F.W. 1941. *Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië*. Den Haag: W.P. v. Stockum & Zn.
- Suryadi. 2007a. "Warkah-warkah Sultan Buton Muhyiuddin Abdul Gafur kepada Kompeni Belanda, koleksi Univrsiteitsbibliotheek Leiden", *Jurnal Sari*, 25: 187-239.
- Suryadi. 2007b. "Surat-surat Sultan Buton Dayyan Asraruddin dan Kaimuddin I, koleksi Univrsiteitsbibliotheek Leiden, Belanda", *Jurnal Humaniora*, 19(3): 284-301.
- Suryadi. 2010. "Dua pucuk surat Kerajaan Buton dari abad ke-17; Kandungan isi dan konteks sejarah", *Jurnal Filologi Melayu*, 17: 123-148.

- Suryadi. 2015. "A linguistic kaleidoscope of the Malay letter; The case of the eighteenth century official letters from the Sultanate of Buton", *Wacana; Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, 16(2): 304-338.
- Suryadi. 2018. "Melempi belunggu kontrak kompeni: Refleksi hubungan Buton-Belanda dalam warkah Verenigde Oostindische Compagnie kepada Sultan Azimuddin", *Malay Literature*, 31(2): 227-262.
- Sutherland, Heather. 2001. "The Makassar Malays: Adaptation and identity, c. 1660 – 1790", *Journal of Southeast Asian Studies*, 32(3): 397-421.
- Sutherland, Heather. 2010. "Traacherous translators and improvident paupers: Perception and practice in Dutch Makassar, eighteenth and nineteenth centuries", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 53: 319-356.
- Sutherland, Heather. 2011. "Whose Makassar?; Claiming space in a segmented city", *Comparative Studies in Society and History*, 53(04): 791-826.
- Wilkinson, R. J. 1932. *A Malay-English Dictionary*. Mytilene: Salavopoulos and Kinderlis.
- Yunus, Abdul Rahim. 1995a. *Posisi Tasawuf dalam sistem kekuasaan di Kesultanan Buton pada abad ke-19*. Jakarta: INIS (Seri INIS XXIV).
- Yunis, Abdul Rahim. 1995b. "Nazariyyah Martabat Tujuh (The theory of 'Martabat Tujuh') in the political system of the Buton Sultanate", *Studia Islamika*, 2(1): 93-110.
- Zahari, Abdul Mulku. 1977. *Sejarah dan ada fiy Darul Butuni [Buton]*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (3 Jilid).
- Zahari, Abdul Mulku (Penyalin & Penerjemah). t.t. "Surat-surat Perjanjian VOC – Kesultanan Buton" [Koleksi Keluarga Abdul Mulku Zahari, Baubau].
- Zuhdi, Susanto, G. A. Ohorella, dan M. Said D. 1995. *Kerajaan tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Zuhdi, Susanto. 2010. *Sejarah Buton yang terabaikan: Labu Rope Labu Wana*. Jakarta: Rajawali Press & Yayasan Kebudayaan Masyarakat Buton.
- Zuhdi, Susanto. 2015. *Perang Buton vs Kompeni-Belanda: Mengenang kepahlawanan La Karambau*. Jakarta: Komunitas Bambu.